JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6261

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

EVALUASI KINERJA APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA JAMBUDIPA KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Yudi Mulyadi Dili [1], Atik Rochaeni [2], Yovinus [3]

ABSTRACT

This article examines the performance evaluation of village officials in the administration of village governance in Jambudipa Village, Cisarua District, West Bandung Regency. The study is grounded in the importance of village officials as the frontline actors in public service delivery, administrative management, community development, and the implementation of village government programs. This research uses a qualitative descriptive approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants include the village head, village secretary, village officials, the chairperson of the Village Consultative Body, and community leaders. The analysis applies public bureaucracy performance indicators, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The findings show that the performance of village officials in Jambudipa Village is generally adequate and has supported the implementation of effective village governance. In terms of productivity, village officials are able to complete tasks and programs according to the planned schedule, although limited human resources and uneven staff capacity still affect performance optimization. Service quality is relatively good, as reflected in clear administrative procedures and transparent services, but service speed and efficiency still need improvement. Responsiveness is shown through the ability of village officials to respond to community aspirations, complaints, and needs, although proactive information delivery should be strengthened. Responsibility is reflected in the commitment of village officials to carry out their duties according to regulations and administrative principles. Accountability is maintained through routine administrative and financial reporting, but stronger documentation, supervision, and public transparency are still needed. This article concludes that improving the performance of village officials requires capacity building, better service standards, stronger information management, and enhanced accountability mechanisms.

Keywords: *performance evaluation, village officials, village governance, public service, Jambudipa Village.*

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan nasional, desa tidak hanya diposisikan sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai kesatuan

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6261

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, serta kebutuhan lokal. Melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024tentang Desa, desa memperoleh ruang yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara lebih mandiri.

Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada desa menuntut kesiapan aparatur desa sebagai pelaksana utama pemerintahan di tingkat lokal. Aparatur desa tidak lagi cukup hanya berperan sebagai pelaksana administrasi sederhana, tetapi harus mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, aparatur desa dituntut memiliki kemampuan kerja, disiplin, tanggung jawab, serta kapasitas pelayanan yang memadai.

Kinerja aparatur desa menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Kinerja yang baik akan terlihat dari kemampuan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, memberikan pelayanan yang jelas dan tidak berbelit, merespons keluhan masyarakat, menjalankan tugas sesuai ketentuan, serta mempertanggungjawabkan setiap program dan kegiatan secara terbuka. Sebaliknya, kinerja aparatur desa yang belum optimal dapat menghambat pelayanan, memperlambat administrasi, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan melemahkan tata kelola pemerintahan desa.

Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu desa yang menarik untuk dikaji karena penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan oleh aparatur desa yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, aparatur desa dituntut mampu melayani masyarakat secara profesional, terutama dalam pelayanan administrasi, penyelesaian surat-menyurat, pelaksanaan program desa, pengelolaan kegiatan pembangunan, serta penyampaian informasi kepada

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6261

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

masyarakat. Tesis yang menjadi dasar artikel ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur Desa Jambudipa secara umum telah berjalan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama efisiensi pelayanan, proaktivitas informasi, penguatan pengawasan, dan dokumentasi administrasi.

Permasalahan kinerja aparatur desa tidak dapat dipahami hanya dari kemampuan individu, tetapi juga berkaitan dengan sistem kerja, pembagian tugas, kepemimpinan kepala desa, ketersediaan sarana prasarana, pemahaman regulasi, serta hubungan antara aparatur dan masyarakat. Dalam praktiknya, aparatur desa sering menghadapi beban kerja yang cukup beragam, mulai dari pelayanan administrasi harian, pelaporan kegiatan, penyusunan dokumen desa, fasilitasi kebutuhan masyarakat, hingga pelaksanaan program pembangunan. Apabila kapasitas aparatur belum merata, maka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan kurang efektif.

Berdasarkan fenomena tersebut, artikel ini diarahkan untuk mengevaluasi kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana aparatur desa mampu menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan kinerja aparatur desa, sekaligus menawarkan pemahaman mengenai pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, responsif, dan dapat dipercaya masyarakat.

b. Kerangka Teoretis

Kajian teoretis dalam artikel ini bertumpu pada konsep kinerja aparatur dalam organisasi publik. Kinerja dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian hasil kerja seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas, program, dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan desa, kinerja aparatur tidak hanya diukur dari

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6261

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

terselesaikannya pekerjaan administratif, tetapi juga dari kualitas pelayanan, kemampuan merespons kebutuhan masyarakat, kepatuhan terhadap aturan, serta pertanggungjawaban atas tugas yang dijalankan.

Teori utama yang digunakan dalam artikel ini mengacu pada indikator kinerja birokrasi publik dari Dwiyanto sebagaimana dikutip dalam Pasolong. Indikator tersebut meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kelima indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja aparatur Desa Jambudipa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Produktivitas berkaitan dengan kemampuan aparatur desa dalam menyelesaikan tugas, program, dan pelayanan secara efektif dan efisien. Produktivitas tidak hanya berbicara tentang banyaknya pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga tentang ketepatan waktu, pemanfaatan sumber daya, dan pencapaian hasil kerja sesuai target. Dalam pemerintahan desa, produktivitas terlihat dari kelancaran pelayanan administrasi, penyelesaian program kerja, serta kemampuan aparatur melaksanakan tugas sesuai jadwal.

Kualitas layanan merupakan gambaran kemampuan aparatur desa memberikan pelayanan yang jelas, cepat, tepat, ramah, dan sesuai prosedur. Kualitas layanan menjadi indikator penting karena masyarakat berhadapan langsung dengan aparatur desa dalam berbagai kebutuhan administratif dan sosial. Pelayanan yang lambat, tidak jelas, atau kurang ramah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sebaliknya, pelayanan yang baik akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik. Responsivitas menunjukkan kemampuan aparatur desa dalam mengenali kebutuhan, aspirasi, keluhan, dan permasalahan masyarakat. Aparatur yang responsif tidak hanya menunggu laporan warga, tetapi juga aktif memahami kondisi masyarakat, menyampaikan informasi, dan menindaklanjuti kebutuhan warga secara cepat. Dalam pemerintahan desa, responsivitas menjadi penting karena persoalan masyarakat sering kali bersifat langsung, mendesak, dan membutuhkan penyelesaian yang dekat dengan kehidupan warga.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6261

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

Responsibilitas adalah pelaksanaan tugas aparatur desa sesuai prinsip administrasi pemerintahan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Aparatur desa harus memahami tugas pokok dan fungsinya, menjalankan program sesuai aturan, serta bekerja berdasarkan prosedur yang benar. Responsibilitas menunjukkan bahwa aparatur desa tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga bekerja dalam koridor hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan aparatur desa mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan, kegiatan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat maupun pihak yang berwenang. Dalam pemerintahan desa, akuntabilitas menjadi penting karena desa mengelola kewenangan, anggaran, dan program yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas yang baik akan memperkuat transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan menggunakan lima indikator tersebut, artikel ini menganalisis kinerja aparatur Desa Jambudipa secara menyeluruh. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil kerja aparatur, tetapi juga terhadap proses pelayanan, sikap aparatur, kemampuan merespons masyarakat, kepatuhan terhadap aturan, serta pertanggungjawaban dalam menjalankan pemerintahan desa.

c. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya menggambarkan dan menganalisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara mendalam. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena kinerja aparatur tidak hanya berdasarkan dokumen atau data administratif, tetapi juga melalui pengalaman, pandangan, dan penilaian para informan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Objek kajian dalam artikel ini adalah kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Jambudipa Kecamatan CisaruaKabupaten Bandung Barat. Fokus penelitian diarahkan pada lima indikator

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6261

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

kinerja, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kelima indikator tersebut digunakan untuk membaca sejauh mana aparatur desa mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pelayanan, pembangunan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada relevansi fenomena kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana aparatur desa menjalankan fungsi pelayanan, administrasi, pembangunan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2. PEMBAHASAN

Evaluasi kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi ruang utama pelayanan publik, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, kualitas pemerintahan desa sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam bekerja secara produktif, memberikan pelayanan yang baik, merespons kebutuhan warga, melaksanakan tugas sesuai aturan, serta mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pemerintahan secara terbuka.

Berdasarkan indikator kinerja birokrasi publik yang digunakan dalam tesis, evaluasi kinerja aparatur Desa Jambudipa dapat dilihat melalui lima aspek utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kelima aspek tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6261

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

Produktivitas tanpa kualitas layanan akan menghasilkan kerja administratif yang kering dan belum tentu memuaskan masyarakat. Kualitas layanan tanpa responsivitas akan membuat pelayanan menjadi prosedural, tetapi kurang peka terhadap kebutuhan warga. Responsibilitas tanpa akuntabilitas dapat membuat aparatur patuh secara administratif, tetapi belum tentu terbuka kepada publik. Oleh karena itu, kinerja aparatur desa harus dibaca secara utuh sebagai kemampuan aparatur dalam menjalankan pemerintahan desa yang efektif, tertib, dan dipercaya masyarakat.

Dilihat dari aspek produktivitas, aparatur Desa Jambudipa pada umumnya telah mampu menyelesaikan tugas dan program yang menjadi tanggung jawabnya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Produktivitas ini terlihat dari pelaksanaan pelayanan administrasi, penyelesaian surat-menyurat, pelaksanaan program kerja desa, serta dukungan terhadap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Aparatur desa telah berupaya bekerja sesuai prioritas dan menjaga kelancaran pelayanan harian di kantor desa. Hal ini menunjukkan adanya komitmen aparatur untuk menjalankan tugas pemerintahan secara teratur.

Namun demikian, produktivitas tersebut belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan kapasitas aparatur, serta pembagian beban kerja yang belum selalu merata masih menjadi tantangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, aparatur tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan rutin, tetapi juga harus memahami regulasi, mengelola administrasi, menyusun laporan, mendukung program pembangunan, serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Beban kerja yang beragam tersebut membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan kemampuan manajerial yang memadai. Apabila kapasitas aparatur belum merata, maka produktivitas akan sangat bergantung pada beberapa orang tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan penumpukan pekerjaan.

Dari aspek kualitas layanan, aparatur Desa Jambudipa telah memberikan pelayanan yang relatif memadai kepada masyarakat. Pelayanan administrasi sudah berjalan dengan prosedur yang cukup jelas, masyarakat dapat mengakses

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6261

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

pelayanan di kantor desa, dan aparatur menunjukkan sikap yang cukup ramah dalam melayani warga. Kualitas layanan ini penting karena masyarakat berhadapan langsung dengan aparatur desa dalam berbagai kebutuhan, seperti pengurusan surat keterangan, administrasi kependudukan, informasi program desa, dan kebutuhan pelayanan lainnya.

Meski demikian, kualitas layanan masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal kecepatan, kepastian waktu, dan efisiensi proses pelayanan. Sebagian masyarakat masih merasakan adanya pelayanan yang belum sepenuhnya cepat, khususnya ketika aparatur yang berwenang tidak berada di tempat atau ketika terdapat kegiatan desa lain yang harus diikuti. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh sikap aparatur, tetapi juga oleh sistem kerja, pembagian tugas, ketersediaan sarana prasarana, serta kejelasan standar pelayanan. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa pelayanan tidak terlalu bergantung pada individu tertentu, tetapi berjalan melalui mekanisme yang tertata dan mudah dipahami masyarakat.

Kualitas layanan juga berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam berkomunikasi. Dalam tesis dijelaskan bahwa aparatur Desa Jambudipa pada umumnya mampu berbicara dengan sopan, ramah, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Hal ini menjadi kekuatan penting karena pelayanan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial. Aparatur desa bekerja di tengah masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan, kedekatan sosial, dan keragaman latar belakang pendidikan. Karena itu, kesopanan, empati, dan kemampuan menjelaskan informasi secara sederhana menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan publik desa.

Selanjutnya, dari aspek responsivitas, aparatur Desa Jambudipa telah menunjukkan kesigapan dalam menanggapi aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat. Keluhan warga umumnya diterima melalui komunikasi langsung, RT/RW, tokoh masyarakat, maupun forum desa. Aparatur desa berupaya menindaklanjuti keluhan tersebut sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Responsivitas ini memperlihatkan bahwa aparatur desa tidak sepenuhnya bekerja

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6261

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

secara pasif, tetapi telah membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Namun, responsivitas aparatur masih perlu diperkuat pada aspek proaktivitas informasi. Masyarakat tidak selalu mampu menyampaikan kebutuhannya secara jelas, terutama dalam urusan administrasi atau program pemerintah. Karena itu, aparatur desa perlu lebih aktif menyampaikan informasi, menjelaskan prosedur, serta mengantisipasi kebutuhan masyarakat sebelum muncul keluhan. Penyampaian informasi melalui RT/RW, papan pengumuman, musyawarah desa, dan media sosial desa perlu dikelola lebih konsisten. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi ketika datang ke kantor desa, tetapi juga mendapatkan akses informasi secara lebih luas dan tepat waktu.

Responsivitas juga berkaitan dengan kepekaan aparatur dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Aparatur Desa Jambudipa dinilai cukup peka dalam mendengarkan aspirasi warga melalui musyawarah dan komunikasi sosial. Kepekaan ini penting agar program desa tidak hanya mengikuti agenda administratif, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program pembangunan dan pelayanan desa akan lebih efektif apabila dirancang berdasarkan aspirasi warga, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta prioritas yang muncul dari bawah. Dalam hal ini, aparatur desa perlu menjaga kedekatan dengan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip profesionalitas dan objektivitas pelayanan.

Pada aspek responsibilitas, aparatur Desa Jambudipa secara umum telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas sesuai peraturan dan kewenangan masing-masing. Program desa disusun dengan mengacu pada aturan yang berlaku, tugas aparatur dibagi berdasarkan fungsi, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi antara kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, BPD, dan unsur masyarakat. Responsibilitas ini menunjukkan bahwa aparatur desa memahami pentingnya bekerja sesuai prosedur agar penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki dasar administrasi yang benar. Akan tetapi, responsibilitas tetap perlu diperkuat melalui peningkatan pemahaman regulasi dan pembinaan aparatur secara berkelanjutan. Pemerintahan desa saat ini

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6261

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

mengelola kewenangan dan anggaran yang semakin besar, sehingga aparatur harus memahami aturan tentang administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, pelayanan publik, dan pelaporan kegiatan. Kesalahan administratif dapat terjadi bukan hanya karena kelalaian, tetapi juga karena keterbatasan pemahaman terhadap regulasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan menjadi kebutuhan penting.

Aspek terakhir adalah akuntabilitas. Aparatur Desa Jambudipa relatif telah menjalankan mekanisme pelaporan administrasi dan keuangan secara rutin. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan program kerja. Akuntabilitas menjadi unsur penting karena pemerintahan desa mengelola sumber daya publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Tanpa akuntabilitas, pelayanan dan pembangunan desa akan kehilangan kepercayaan publik.

Namun, penguatan akuntabilitas masih diperlukan, terutama dalam aspek dokumentasi, pengawasan, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pelaporan yang dilakukan kepada lembaga pemerintahan perlu diimbangi dengan penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh warga. Masyarakat perlu mengetahui program apa yang dijalankan, bagaimana proses pelaksanaannya, berapa anggaran yang digunakan, serta manfaat apa yang dihasilkan. Dengan keterbukaan seperti ini, kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa akan semakin kuat.

Secara keseluruhan, kinerja aparatur Desa Jambudipa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dinilai cukup baik dan telah mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Aparatur desa telah menunjukkan produktivitas kerja, kualitas layanan, respons terhadap masyarakat, tanggung jawab pelaksanaan tugas, dan mekanisme pertanggungjawaban. Namun, beberapa aspek masih perlu diperkuat, terutama efisiensi pelayanan, pemerataan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, proaktivitas penyampaian informasi, serta penguatan dokumentasi dan pengawasan. Dengan perbaikan tersebut, kinerja aparatur Desa Jambudipa dapat

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6261

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

semakin meningkat dan pemerintahan desa dapat berjalan lebih profesional, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3. PENUTUP

a. Simpulan

Kinerja aparatur Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan pelayanan administrasi, menanggapi kebutuhan masyarakat, serta menjalankan program kerja desa sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Aparatur desa telah menunjukkan komitmen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dilihat dari aspek produktivitas, aparatur desa mampu menyelesaikan tugas dan program kerja sesuai jadwal, meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya dan kapasitas pegawai yang belum merata. Dari aspek kualitas layanan, pelayanan kepada masyarakat sudah relatif memadai, ditandai dengan prosedur administrasi yang cukup jelas dan sikap aparatur yang cukup terbuka, namun masih perlu peningkatan dalam kecepatan dan efisiensi pelayanan. Pada aspek responsivitas, aparatur desa telah menunjukkan kesigapan dalam menanggapi aspirasi dan keluhan masyarakat, tetapi penyampaian informasi secara proaktif masih perlu diperkuat.

Dari aspek responsibilitas, aparatur desa telah menjalankan tugas sesuai kewenangan dan prinsip administrasi pemerintahan desa, meskipun pemahaman terhadap regulasi dan disiplin kerja masih perlu terus dibina. Sementara itu, pada aspek akuntabilitas, mekanisme pelaporan administrasi dan keuangan sudah berjalan, tetapi penguatan dokumentasi, pengawasan, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat masih diperlukan. Dengan demikian, kinerja aparatur Desa Jambudipa telah mendukung tata kelola pemerintahan desa yang cukup efektif, namun masih membutuhkan peningkatan pada aspek efisiensi layanan,

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6261

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

proaktivitas informasi, pemerataan kapasitas aparatur, dan penguatan akuntabilitas publik.

b. Saran

Pemerintah Desa Jambudipa perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan rutin, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan desa, pelayanan publik, pengelolaan dokumen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan kapasitas ini penting agar setiap aparatur memiliki kemampuan yang relatif merata dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pemerintah desa perlu memperbaiki sistem pelayanan agar lebih cepat, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat. Penyusunan standar pelayanan, kepastian waktu penyelesaian, serta pemanfaatan media informasi desa dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan secara lebih efektif dan transparan.

Pemerintah desa juga perlu memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui forum warga, musyawarah desa, papan informasi, dan media digital desa. Dengan penyampaian informasi yang lebih proaktif, masyarakat dapat lebih mudah memahami program, prosedur pelayanan, serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terakhir, akuntabilitas aparatur desa perlu diperkuat melalui dokumentasi yang tertib, pelaporan yang terbuka, serta pengawasan internal yang berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat meningkat, dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Jambudipa dapat berjalan lebih profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

REFERENSI

Hamzah, N., & Lamatenggo. (2012). *Teori kinerja dan pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mangkunegara, A. P. (2007). *Evaluasi kinerja sumber daya manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6261

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 27 Apr 2026

Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan publik: Pelayanan terpadu administrasi kecamatan*. Bandung: CV Indra Prahasta.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Moeheriono. (2020). *Pengukuran kinerja berbasis kompetensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Z. (2013). *Manajemen pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Pasolong, H. (2017). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.

Siagian, S. P. (2014). *Administrasi pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudarmanto. (2018). *Kinerja dan pengembangan kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwatno, & Priansa, D. J. (2018). *Manajemen SDM dalam organisasi publik dan bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024tentang Desa.